

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG
Jl. PISANG GAJIH NO.1 LUMAJANG**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada tahun 2023 ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah selesai menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026. Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 dilaksanakan guna mendukung **Tujuan 2** yaitu **“Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif”** dengan **Sasaran “Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan”** dan **Tujuan 3** yaitu **“Terwujudnya ruang wilayah yang nyaman dan berkelanjutan”** dengan **sasaran “Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman”**.

Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 digunakan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen laporan. Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi perbaikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan ditetapkannya Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2024-2026.

Lumajang, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak



Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 9 |
| 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah..... | 9 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 24 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan..... | 51 |
| 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan..... | 58 |
| 2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah ... | 59 |
| 2.7 Kerja Sama Perangkat Daerah..... | 59 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.. | 65 |
| 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 65 |
| 3.2 Isu Strategis..... | 66 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 68 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran..... | 68 |
| 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah..... | 70 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 82 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 84 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 113 |
| 7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024- 2026..... | 113 |
| 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... | 114 |

BAB VIII PENUTUP 122

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 3 tahun. Fungsi Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024–2026 merupakan landasan bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan pada urusan bidang Sosial dan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Renstra PD ini disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan 2 urusan tersebut diatas secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 3 tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dua urusan yang dijabarkan di atas tertulis sebagai urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di Kabupaten Lumajang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan urusan bidang sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan bentuk perwujudan di tingkat kabupaten.

Proses penyusunan Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana diatur dalam Bagian Kelima tentang Tata Cara Penyusunan Renstra PD Pasal 359 dinyatakan bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra PD. Tahapan tersebut meliputi; (a) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (b) Penyusunan Rancangan Renstra, (c) Penyusunan Akhir Renstra, dan (d) Penetapan Renstra.

Keterkaitan Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 dengan dokumen RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan komitmen Pembangunan Responsif Gender dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dalam

bentuk penyelarasan target antara Renstra PD dengan RPD Kabupaten Lumajang, karena Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2022 masih mencapai 88,77 sedangkan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Tahun 2022 mencapai 59,61. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Sedangkan persentase PPKS mandiri sebesar 15,84%, Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 87,57% dan Persentase peningkatan jumlah PPKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS sebesar 81,38%. Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial untuk dapat menjangkau PPKS Mandiri sesuai target mengingat tiap tahun terdapat kenaikan jumlah PPKS.

Target Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra PD selanjutnya menjadi acuan untuk menyusun Renja PD guna memastikan bahwa pelaksanaan anggaran di tahun berkenaan memiliki kontribusi bagi pemenuhan target jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024–2026 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional maupun pembangunan di Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana

- Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan di Kabupaten Lumajang;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
 33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lumajang;

34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak mampu dan Penghafal Al-Qur'an;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi dan interaksi secara internal, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lintas sektor terkait, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

2. Tujuan :

Sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.5. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
- 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Pada umumnya struktur organisasi adalah suatu susunan komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian kunci dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu dengan lainnya.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;

- 2) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan, pemberdayaan sosial, dan kepahlawanan serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 4) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 5) pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak dan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan pemberdayaan sosial dan kepahlawanan, serta pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- 6) pengelolaan kawasan tertentu dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan dasar hukum yang disebutkan pada paragraf kedua diuraikan dengan susunan sebagai berikut :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

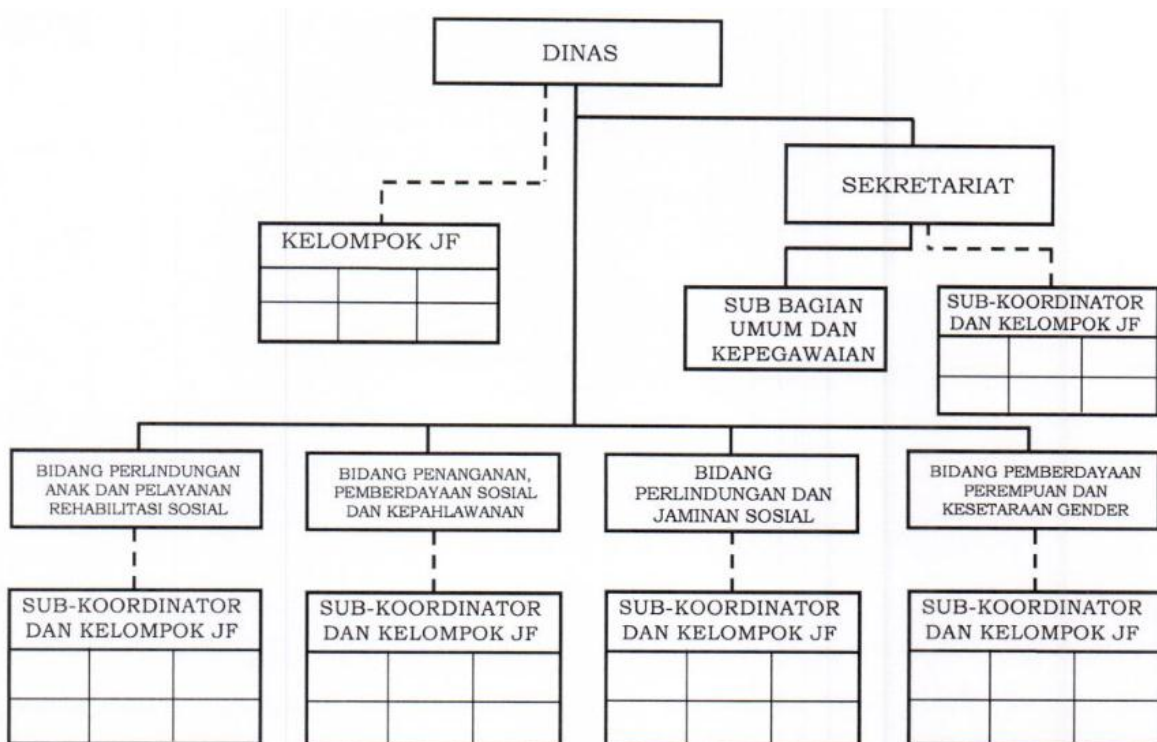
b. Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat, mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 3) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- 4) pengelolaan urusan rumah tangga;
- 5) pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- 6) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- 8) penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- 9) pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- 10) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- 11) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
- 14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) penyusunan rencana kerja Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- 3) penyusunan kebijakan teknis perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 4) penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 5) pelaksanaan upaya-upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan

terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;

- 6) pelaksanaan upaya-upaya pengembangan pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 7) pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat;
- 8) pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak anak, tumbuh kembang anak, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penguatan jejaring, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan serta partisipasi masyarakat.
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
- 10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan. Untuk melaksanakan tugas tugas tersebut Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- 2) pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 3) penyusunan program dan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 5) penyusunan pedoman penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- 6) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 7) pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 8) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 9) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 10) pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi, pembinaan serta

pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, fasilitasi pejuang, perintis kemerdekaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan;

- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

- 4) penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 5) pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 6) pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 7) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 8) penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar operasional dan prosedur penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

- 9) pelaksanaan pengembangan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, korban bencana alam, korban bencana sosial dan orang terlantar, kelompok rentan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya, pembinaan dan fasilitasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) penyusunan rencana kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga;

- 3) penyusunan kebijakan teknis perlindungan perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 4) penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 5) pelaksanaan upaya teknis terciptanya keterpaduan, sinkronisasi pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 6) pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;
- 7) pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pendayagunaan perlindungan hak perempuan, penguatan jejaring, pencegahan kekerasan terhadap perempuan,

penyediaan layanan bagi perempuan, data dan informasi gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga;

- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya sarana. Sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 Data Kepegawaian sedangkan rincian sarana dapat dilihat pada tabel 2.2 Data Sarana

Tabel 2.1 Data Kepegawaian

| Uraian | | | Laki-Laki | Perempuan | Total | Satuan |
|-------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------|--------|
| a) Jenis Kepegawaian | | | | | | |
| 1) | PNS / CPNS | : | 9 | 14 | 23 | Orang |
| 2) | Tenaga Kontrak | : | 20 | 20 | 40 | Orang |
| c) Menurut Jabatan | | | | | | |
| 1) | Eselon II | : | 0 | 1 | 1 | Orang |
| 2) | Eselon III | : | 2 | 3 | 5 | Orang |
| 3) | Eselon IV | : | 1 | 0 | 1 | Orang |
| 3) | Fungsional | : | 4 | 8 | 12 | Orang |
| d) Menurut Pendidikan | | | | | | |
| 1) | Sekolah Dasar | : | 0 | 0 | 0 | Orang |
| 2) | SLTP | : | 0 | 0 | 0 | Orang |
| 3) | SLTA | : | 13 | 3 | 16 | Orang |
| 4) | D1 s/d D3 | : | 1 | 3 | 4 | Orang |
| 5) | S1 | : | 9 | 27 | 36 | Orang |
| 6) | S2 | : | 0 | 1 | 1 | Orang |
| e) Diklat Penjenjangan | | | | | | |
| 1) | PKN II | : | 0 | 0 | 0 | Orang |
| 2) | PKA | : | 0 | 2 | 2 | Orang |
| 3) | PKP | : | 3 | 6 | 9 | Orang |

Tabel 2.2 Data Sarana

| No. | Nama Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan |
| 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 1 | Genset | 2 | 2 | |
| 2 | Kendaraan Dinas | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Perahu Motor dan perlengkapannya | 1 | | 1 |
| 4 | Sepeda Motor | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Televisi | 3 | 3 | |
| 6 | Meja Kerja Es. III | 5 | 5 | |
| 7 | Meja Kerja Es. IV | 12 | 12 | |
| 8 | Meja Staf/ Non Struktural | 22 | 22 | |
| 9 | Kursi Kerja Es. III | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Kursi Kerja Es. IV | 2 | | 2 |
| 11 | Meja kerja | 65 | 60 | 5 |
| 12 | Kursi putar | 14 | 11 | 3 |
| 13 | Meja Rapat Panjang | 1 | | 1 |
| 14 | Proyektor | 6 | 3 | 3 |
| 15 | Lemari Besi | 20 | 20 | |
| 16 | Lemari Kayu | 6 | 6 | |
| 17 | Almari Kaca | 3 | 3 | |
| 18 | Rak Arsip Kayu | 8 | 6 | 2 |
| 19 | Rak Buku Almari | 5 | 4 | 1 |
| 20 | Filling Kabinet | 9 | 4 | 5 |
| 21 | Camera Digital | 6 | 3 | 3 |
| 22 | Megaphone | 4 | | 4 |
| 23 | Wireless | 1 | | 1 |
| 24 | Meja Kursi Tamu | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Sofa / Kursi pojok | 1 | 1 | |
| 26 | Meja Makan | 2 | 2 | |
| 27 | Lemari Es | 3 | 3 | |
| 28 | Tempat Tidur Susun Kayu | 4 | 4 | |
| 29 | Tempat Tidur Lengkap | 29 | 21 | 8 |
| 30 | Mesin Jahit | 2 | | 2 |
| 31 | Velbed Alumunium | 10 | 10 | |
| 32 | Alat Dapur Umum | 1 | 1 | |
| 33 | Mesin Potong Rumput | 5 | 2 | 3 |
| 34 | Papan Pengumuman | 2 | | 2 |

| No. | Nama Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | |
|-----|-------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan |
| 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 35 | Papan Data | 3 | | 3 |
| 36 | Vacum cleaner | 1 | | 1 |
| 37 | Mesin Cuci | 2 | | 2 |
| 38 | Kompom Gas | 4 | 3 | 1 |
| 39 | Tripod Sound | 1 | | 1 |
| 40 | Pesawat Faximaile | 1 | | 1 |
| 41 | AC | 25 | 22 | 3 |
| 42 | Facial Bed | 5 | | 5 |
| 43 | Handycam | 2 | 2 | |
| 44 | Meja Eselon II | 2 | 2 | |
| 45 | Kursi Eselon II | 2 | 2 | |
| 46 | Brankas Besi | 1 | 1 | |
| 47 | Almari Obat | 1 | 1 | |
| 48 | Almari Pakaian | 15 | 15 | |
| 49 | UPS Komputer | 3 | 3 | |
| 50 | Water Heater | 1 | 1 | |
| 51 | Kamera Saku | 1 | | 1 |
| 52 | Dispenser | 3 | 3 | |
| 53 | UPS Komputer | 21 | 21 | |
| 54 | Tempat Tidur Pijat | 5 | 5 | |
| 55 | KIPAS ANGIN | 10 | 10 | |
| 56 | EXHAUST | 6 | 6 | |
| 57 | Mesin Penghancur Kertas | 2 | 2 | |
| 58 | Meja Rapat | 24 | 24 | |
| 59 | Kursi Rapat | 51 | 51 | |
| 60 | Bangku Tunggu | 4 | 4 | |
| 61 | Sound System | 1 | 1 | |
| 62 | CCTV | 1 | 1 | |
| 63 | Almari Dorong | 1 | 1 | |
| 64 | Penghancur kertas | 1 | | 1 |
| 65 | Layar Proyektor | 1 | 1 | |
| 66 | Handy Talkie | 10 | 10 | |
| 67 | Tensi digital | 1 | | 1 |
| 68 | Alat Bantu Pijat | 5 | 5 | |
| 69 | Kursi Roda | 5 | 5 | |
| 70 | Komputer | 52 | 46 | 6 |
| 71 | Laptop & Note Book | 9 | 4 | 5 |

| No. | Nama Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan |
| 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 72 | Speaker Aktif Komputer | 1 | | 1 |
| 73 | Printer | 62 | 47 | 15 |
| 74 | Router | 6 | 6 | |
| 75 | Hub | 2 | 1 | 1 |
| 76 | Modem | 1 | | 1 |
| 77 | Kabel UTP + konektor | 1 | | 1 |
| 78 | Printer Dot Matrik | 5 | 4 | 1 |
| 79 | Galaxy Tab | 2 | 2 | |
| 80 | Hard Disk Eksternal | 3 | 2 | 1 |
| 81 | scaner | 1 | 1 | |
| 82 | Server | 1 | 1 | |
| 83 | Lain-Lain Peralatan Jaringan | 1 | 1 | |
| 84 | LCD | 1 | | 1 |
| 85 | Monitor 24" | 2 | 2 | |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan target Renstra PD periode sebelumnya dijabarkan pada Tabel 2.3 T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Tabel 2.4 T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pada tabel 2.3 dapat melihat target, realisasi capaian, dan rasio capaian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 untuk indikator sasaran dan indikator program. Sedangkan pada Tabel 2.4 dapat melihat anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Selain terkait realisasi indikator sasaran-program dan realisasi anggaran, pada sub bab ini juga dijabarkan tentang

capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disajikan pada Tabel 2.5 Pencapaian SPM Tahun 2023 Triwulan I. adapun data SPM yang dimaksud bersumber dari [link spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas : 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.3 T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2019-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Peningkatan Penanganan PMKS | N/A | N/A | N/A | 15,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase PMKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | N/A | N/A | N/A | 80 % | 90,90 % | N/A | N/A | N/A | 90 % | 90 % | N/A | N/A | | 113% | 101% | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase PMKS Yang Telah Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | N/A | N/A | N/A | 80 % | 90,90 % | N/A | N/A | N/A | 95 % | 95 % | N/A | N/A | | 119% | 96% | N/A | N/A | N/A |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | N/A | N/A | | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | N/A | N/A | | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase pemenuhan laporan dan capaian kinerja | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | N/A | N/A | | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A |
| Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | N/A |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase PMKS dan PSKS yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial | N/A | N/A | N/A | 80 % | 90 % | N/A | N/A | N/A | 95 % | 95 % | N/A | N/A | | 119% | 95% | N/A | N/A | N/A |
| Indeks Pemberdayaan Gender | N/A | N/A | N/A | 59,62 | 59,87 | 60,12 | 60,37 | 60,62 | | | | | | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender | N/A | N/A | N/A | 63 OPD | 70 OPD | N/A | N/A | N/A | 63 OPD | 70 OPD | N/A | N/A | | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,4 % | N/A | | N/A | N/A | 106 % | N/A | N/A |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,6 % | N/A | | N/A | N/A | 106 % | N/A | N/A |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase Korban Bencana Yang Mendapat Penanganan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,29 % | N/A | | N/A | N/A | 133 % | N/A | N/A |
| Persentase Peningkatan jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|---------|------|-------------------------|------|---------|------|------|---------------------|---------|-------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,55 % | N/A | | N/A | N/A | 106 % | N/A | N/A | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | N/A | | N/A | N/A | 167 % | N/A | N/A | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,66 % | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen yang Responsif Gender | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 | Dokumen | 46 | Dokumen | 46 | Dokumen | N/A | N/A | 52 | Dokumen | N/A | | N/A | N/A | 113 % | N/A | N/A |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|---|--|---|--|---|--|-------------------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | en | | | | | | | | |
| Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 | OPD | 46 | OPD | 46 | OPD | N/A | N/A | 52 | OPD | N/A | | N/A | N/A | 113% | N/A | N/A |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Jml Perempuan Korban kekerasan yg terfasilitasi terhadap jumlah perempuan se Kab | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | % Perempuan Korban Kekerasan Terfasilitasi | 100 | % Perempuan Korban Kekerasan Terfasilitasi | 100 | % Perempuan Korban Kekerasan Terfasilitasi | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Data yang dikelola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Tersedia Data gender, Perempuan dan Anak Setiap Tahun | | Tersedia Data gender, Perempuan dan Anak Setiap Tahun | | Tersedia Data gender, Perempuan dan Anak Setiap Tahun | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------|--|------|--|------|--|------|------|---------------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | % anak yang Merlukan Perlindungan Khusus | 100 | % anak yang Merlukan Perlindungan Khusus | 100 | % anak yang Merlukan Perlindungan Khusus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Kelembagaan Yang memfasilitasi Hak anak | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | % Anak Terpenuhi Hak - Hak Dasarnya | 100 | % Anak Terpenuhi Hak - Hak Dasarnya | 100 | % Anak Terpenuhi Hak - Hak Dasarnya | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase perceraian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-----------|-------|------|---------------------|------|-------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Persentase cakupan pernikahan usia anak | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Persentase cakupan KDRT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rehabilitasi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 % | 83 % | 84 % | N/A | 80,00 % | 84,44 % | 100 % | | N/A | N/A | 106 % | 120% | 0% |
| Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 135 orang | 100 % | | N/A | N/A | 135 % | 100% | 0% |
| Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 15 orang | 100 % | | N/A | N/A | 15% | 100% | 0% |
| Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 15 orang | 100 % | | N/A | N/A | 15% | 100% | 0% |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|----------|-------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 50 orang | 100 % | | N/A | N/A | 5% | 100% | 0% |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase PPKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 % | 83 % | 84 % | N/A | 80 % | 84.46 % | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Program Penanganan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Korban bencana yg mendapat pemenuhan kebutuhan dasar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | 100 % | 133.28 % | 100 % | | N/A | N/A | N/A | 100% | 0% |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------|------|------------|-----------|----|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | 63 44 | o r a n g | 10 36 9 | o r a n g | 9577 | N/A | N/A | 103 69% | 9577 % | 0% |
| Program Pemberdayaan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Kesos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 % | 83 % | 84 % | N/A | 80 % | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosentase Taman Makam Pahlawan yg dikelola sesuai standart kemensos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 % | 62 % | 63 % | N/A | 60 % | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | |
| Indeks Pemberdayaan Gender | N/A | N/A | N/A | 59,62 | 59,87 | 60,12 | 60,37 | 60,62 | 63 OPD | 70 | OPD | | | | 117% | 0% | 0% | 0% | |
| Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase ARG pada Belanja APBD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 % | 20 % | 22 % | N/A | 17,93 | % | 17,93 % | 19,84 % | | N/A | N/A | 100 % | 99% | 0% |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------------------------|------|--------|------|------|---------------------|------|-------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase penurunan perceraian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 % | 5 % | 6 % | N/A | N/A | 100 % | N/A | | N/A | N/A | 2500% | N/A | 0% |
| Persentase penurunan pernikahan usia anak | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 100 % | N/A | | N/A | N/A | 100 % | N/A | 0% |
| Persentase cakupan penurunan KDRT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 100 % | N/A | | N/A | N/A | 100 % | N/A | 0% |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 Buku | 1 Buku | 1 Buku | N/A | N/A | 1 Buku | N/A | | N/A | N/A | 100 % | N/A | 0% |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 100 % | N/A | | N/A | N/A | 100 % | N/A | 0% |
| Program Perlindungan Khusus Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------|------|---------------------|------|-------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 3 % | 10 % | N/A | N/A | 100 % | 0,02 % | | N/A | N/A | 100 % | 1% | 0% |
| Program Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terfasilitasi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 60 % | 100 % | N/A | 100 % | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | N/A | 100 % | 100 % | 96,80 % | | N/A | N/A | 100 % | 97% | 0% |

Tabel 2.4 T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|---------------------|---------------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2019-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Peningkatan Penanganan PMKS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.239.289.000 | 1.216.035.750 | N/A | N/A | N/A | 1.239.289.000 | 208.317.000 | N/A | N/A | N/A | 100% | 17% | N/A | N/A | N/A | -2% | -83% |
| PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL | 999.597.500 | 952.791.250 | N/A | N/A | N/A | 999.597.500 | 495.194.750 | N/A | N/A | N/A | 100% | 52% | N/A | N/A | N/A | -5% | -50% |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 848.146.988 | 977.206.700 | N/A | N/A | N/A | 848.146.988 | 758.859.800 | N/A | N/A | N/A | 100% | 78% | N/A | N/A | N/A | 15% | -11% |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 795.556.000 | 1.527.791.000 | N/A | N/A | N/A | 795.556.000 | 334.053.100 | N/A | N/A | N/A | 100% | 22% | N/A | N/A | N/A | 92% | -58% |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 4.610.000 | 42.632.000 | N/A | N/A | N/A | 4.610.000 | 13.060.000 | N/A | N/A | N/A | 100% | 31% | N/A | N/A | N/A | 825% | 183% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|---------------------|---------------|---------------|------|------|-------------------------------|-------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.441.514.000 | 1.825.970.700 | N/A | N/A | N/A | 1.441.514.000 | 894.568.000 | N/A | N/A | N/A | 100% | 49% | N/A | N/A | N/A | 27% | -38% |
| Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 467.151.720 | 773.456.504 | N/A | N/A | N/A | 270.161.500 | 338.661.000 | N/A | N/A | N/A | 58% | 44% | N/A | N/A | N/A | 66% | 25% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | N/A | N/A | 247.947.750 | N/A | N/A | N/A | N/A | 242.036.750 | N/A | N/A | - | - | 98% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | N/A | N/A | 5.428.690.700 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.296.360.110 | N/A | N/A | - | - | 98% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | N/A | N/A | 166.143.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 162.635.200 | N/A | N/A | - | - | 98% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | N/A | N/A | 5.731.888.300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.653.074.200 | N/A | N/A | - | - | 99% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | N/A | N/A | 210.457.746 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.907.200 | N/A | N/A | - | - | 9% | - | - | N/A | N/A |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|------|---------------------|------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.68 7.64 6.22 4 | N/A | N/A | - | - | - | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | N/A | N/A | 71.2 38.0 00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.5 60.4 06 | N/A | N/A | - | - | 34% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | N/A | N/A | 21.6 45.0 00 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - | - | 0% | - | - | N/A | N/A |
| PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | N/A | N/A | 3.00 0.00 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - | - | 0% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | N/A | N/A | 46.2 66.0 00 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - | - | 0% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | N/A | N/A | 59.5 56.4 00 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - | - | 0% | - | - | N/A | N/A |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | N/A | N/A | 244. 095. 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - | - | 0% | - | - | N/A | N/A |
| | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Rehabilitasi Sosial | N/A | N/A | 247.947.750 | 4.204.710.860 | 4.204.710.860 | N/A | N/A | 238.196.750 | 4.193.443.900 | 1.021.638.000 | - | - | 96% | 100% | 24% | 1596% | 1623% |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | N/A | N/A | 5.428.690.700 | 7.490.666.750 | 7.490.666.750 | N/A | N/A | 5.250.623.250 | 18.907.189.250 | 27.000.000 | - | - | 97% | 252% | 0% | 38% | 210% |
| Program Penanganan Bencana | N/A | N/A | 166.143.000 | 210.987.000 | 210.987.000 | N/A | N/A | 162.635.200 | 784.909.000 | 52.000.000 | - | - | 98% | 372% | 25% | 27% | 336% |
| Program Pemberdayaan Sosial | N/A | N/A | 5.731.888.300 | 712.905.400 | 712.905.400 | N/A | N/A | 5.653.074.200 | 2.284.915.250 | 33.661.000 | - | - | 99% | 321% | 5% | -88% | -109% |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | N/A | N/A | 210.457.746 | 102.245.800 | 102.245.800 | N/A | N/A | 210.402.219 | 118.462.800 | 24.324.000 | - | - | 100% | 116% | 24% | -51% | -83% |
| Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | N/A | N/A | 25.050.000 | - | 25.000.000 | N/A | N/A | 24.560.406 | 8.355.000 | 10.200.000 | - | - | 98% | 100% | 41% | 0% | -55% |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga | N/A | N/A | 4.350.000 | - | - | N/A | N/A | 4.350.000 | - | 5.100.000 | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | N/A | N/A | 2.486.000 | - | 2.486.000 | N/A | N/A | 2.486.000 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|------|------------|-----------|------------|-------------------------------|------|------------|---------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | N/A | N/A | 14.049.000 | - | 14.049.000 | N/A | N/A | 13.422.000 | - | 9.485.000 | - | - | 96% | 0% | 68% | 0% | 0% |
| Program Perlindungan Khusus Anak | N/A | N/A | 43.904.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | N/A | N/A | 28.798.000 | 3.400.000 | 6.729.000 | - | - | 66% | 57% | 112% | -86% | -39% |
| Program Perlindungan Perempuan | N/A | N/A | 21.645.000 | - | 25.000.000 | N/A | N/A | - | - | 1.675.000 | - | - | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | - | - | - | N/A | N/A | 3.485.714 | 4.501.331.892 | 912.930.828 | - | - | - | - | - | 0% | -11% |

Tabel 2.5 Pencapaian SPM Tahun 2023 Triwulan I

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | | | | 47.63 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 32.73 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 4,468 | 1,828 | 2,64 | 41% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 14.90 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 74.49 % |
| | | -1 | -2 | -3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 7 | 7 | 0 | |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan permakanan | 4,468 | 354 | 4,114 | 7.92 % |
| | 5 . Penyediaan sandang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan alat bantu | 21 | 21 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 4,468 | 1,828 | 2,64 | 40.91 % |
| | 9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar | 4,468 | 1,828 | 2,64 | 40.91 % |
| | 10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 4,468 | 1,828 | 2,64 | 40.91 % |
| | 11 . Akses ke layanan pendidikan | 4,963 | 2,27 | 2,693 | 45.74 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 4,468 | 1,828 | 2,64 | 40.91 % |
| | 13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Layanan rujukan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 2 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | 98.96 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | <i>3,19</i> | <i>3,19</i> | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 18.96 % |
| | | Jumlah yang | Jumlah yang | Jumlah yang | 94.80 % |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | | harus dilayani | terlayani | belum terlayani | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan permakanan | 3,185 | 699 | 2,486 | 21.95 % |
| | 3 . Penyediaan sandang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan alat bantu | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 3,19 | 3,19 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 3,19 | 3,19 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Akses ke layanan pendidikan | 3,185 | 3,185 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 5 | 5 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Layanan rujukan | 3,185 | 3,185 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 3 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 87,542 | 87,542 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | -1 | -2 | -3 | |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanaan | 87,542 | 87,542 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 87,542 | 87,542 | 0 | 100.00 % |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | 15 | 15 | 0 | 100.00 % |
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 4 . | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | 100.00 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 9 | 9 | 0 | 100% |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | 1 . Layanan data dan pengaduan | 7 | 7 | 0 | 100.00 % |
| | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan permakanaan | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penyediaan sandang | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Penyediaan alat bantu | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 10 . Akses ke layanan pendidikan | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |
| | 13 . Layanan rujukan | 9 | 9 | 0 | 100.00 % |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| 5 . | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 100.00 % |
| | | Ya Terjadi Bencana | | | |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | Jumlah Total | Jumlah Total | Yang Belum | 80.00 % |
| | | Yang Harus Dilayani | Yang Terlayani | Terlayani | |
| | • Jumlah yang Harus Dilayani : | 1,836 | 1,836 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | 20.00 % |
| | | Jumlah yang harus dilayani | Jumlah yang terlayani | Jumlah yang belum terlayani | 100.00 % |
| | | -1 | -2 | -3 | |
| | 1 . Penyediaan permakanan | 4,73 | 4,73 | 0 | 100.00 % |

| KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | | | TUNTAS MADYA | 89.32 % |
|---------------------------------------|--|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | 2 . Penyediaan sandang | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 | 1 | 0 | 100.00 % |
| | 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 15,81 | 15,81 | 0 | 100.00 % |
| | 5 . Pelayanan dukungan Psikososial | 3,8 | 3,8 | 0 | 100.00 % |

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi unsur :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari 26 sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu :
 - a. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
 - b. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
 - d. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
 - e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai

kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- h. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- i. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- j. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-

- ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- k. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
 - l. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkas belas kasihan orang lain.
 - m. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
 - n. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
 - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
 - p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

- q. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- r. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- s. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- u. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- v. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- w. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
 - x. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - y. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
 - z. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.
2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari 12 sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu :
- a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan

kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

- c. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- e. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
- g. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
- h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

- i. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
 - j. Penyuluh Sosial :
 - 1) Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - 2) Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
 - l. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
3. Perangkat Daerah
 4. Perempuan
 5. Organisasi Masyarakat
 6. Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
 7. Keluarga
 8. Anak
 9. Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak
 10. Kampung Siaga Bencana
 11. Karang Werda

12. Taman Makam Pahlawan
13. Pendamping PKH
14. Petugas Kecamatan
15. Perangkat Desa

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermitra dengan :

- 1) Kementerian Sosial
- 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- 5) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Badan Pusat Statistik
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10) Polres
- 11) RSUD dr. Haryoto
- 12) RSUD Pasirian
- 13) RS Bhayangkara
- 14) TP PKK
- 15) Kecamatan
- 16) Desa
- 17) Satuan Polisi Pamong Praja
- 18) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 20) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 21) Dinas Tenaga Kerja
- 22) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 23) Dinas Komunikasi dan Informatika

- 24) Bagian Hukum Setda
- 25) Pengadilan Negeri
- 26) Kementerian Agama
- 27) Cabang Dinas Pendidikan
- 28) BPJS Kesehatan
- 29) Kantor Pos
- 30) BNI
- 31) Bank Jatim
- 32) Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial
- 33) Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial

2.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian kinerjanya masih belum ada dukungan dari BUMD.

2.7 Kerja Sama Perangkat Daerah

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan kerja sama agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan baik. Kerja sama dalam organisasi harus dibangun secara internal maupun secara eksternal. Kerja sama secara internal merupakan perwujudan dari kerja sama antar lintas program. Kerja sama secara eksternal merupakan perwujudan dari kerja sama antar lintas sektor. Gambaran kerja sama lintas sektor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada Tabel 2.6 Kerja Sama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.6 Kerja Sama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Judul Perjanjian Kerja Sama | Mitra Kerja Sama | Nomor Perjanjian Kerja Sama | Jangka Waktu Kerja Sama | Bentuk Kerja Sama |
|----|---|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kabupaten Lumajang Tahun 2018 | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 2 Tahun 2018 dan Nomor : 23/KTR/VII-07/0118 | 1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 | Menyelenggarakan pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional |
| 2 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Perluasan Kepesertaan Program JKN-KIS Dalam Mewujudkan Universal Health Coverage Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 3 Tahun 2018 dan Nomor : 24/KTR/VII-07/0118 | 17 Januari 2018 - 17 Desember 2018 | Peningkatan dan penguatan komitmen dalam cakupan kepesertaan JKN-KIS |
| 3 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kab. Lumajang dengan Radio Gloria Paramitha FM | Radio Gloria FM Lumajang | 800/080/427.48 /2019 | 1 Tahun | Publikasi dan Promosi Layanan PPT-PPA |
| 4 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Kepesertaan Program JKN Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/37-PKS/427.11/2018 dan Nomor : 299/KTR/VII-07/1218 | 1 Januari 2019 - 31 Desember 2019 | Menyelenggarakan jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang |

| No | Judul Perjanjian Kerja Sama | Mitra Kerja Sama | Nomor Perjanjian Kerja Sama | Jangka Waktu Kerja Sama | Bentuk Kerja Sama |
|----|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Kepesertaan Program JKN Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/24-PKS/427.11/2019 dan Nomor : 660/KTR/VII-07/1219 | 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020 | Melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang |
| 6 | Kesepakatan Bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang dengan Yayasan Bina Sejahtera Indonesia Tentang Penyusunan Naskah Akademis | Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (Yayasan Bahtera) | 1352/212 KSB/427.49/2020 | 1 Tahun | Penelitian |
| 7 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Kepesertaan Program JKN Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/26-PKS/427.11/2020 dan Nomor : 253/KTR/VII-07/1220 | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 | Melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Lumajang |
| 8 | Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Bantuan Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Kelas III Penduduk Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/08-PKS/427.11/2021 dan Nomor : 75/KTR/VII-07/0421 | 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 | Pembayaran bantuan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP Kelas III dengan status kepesertaan aktif yang terdaftar di FKTP Kabupaten Lumajang |

| No | Judul Perjanjian Kerja Sama | Mitra Kerja Sama | Nomor Perjanjian Kerja Sama | Jangka Waktu Kerja Sama | Bentuk Kerja Sama |
|----|--|----------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama Kab. Lumajang | LBH Nahdatul Ulama | 130/26/427.48/2021 | Hingga dengan waktu yang tidak ditentukan | Pendampingan Korban |
| 10 | Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dan Pemberdayaan Perempuan dengan Endah Suprapti, S.Psi., Psikolog | Endah Suprapti, S.Psi., Psikolog | 130/78/427.48/2021 | 1 Tahun | Pendampingan Korban |
| 11 | Nota Kesepakatan Antara BPJS Kesehatan Cabang Jember Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 276/KTR/VII-07/1121 Dan Nomor : 130/NK-13/427.11/2021 | 5 Tahun | Penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan Program JKN |
| 12 | Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Kepesertaan Program JKN Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/RK-15/427.11/2021 dan Nomor : 288/KTR/VII-07/1221 | 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022 | Melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Lumajang |

| No | Judul Perjanjian Kerja Sama | Mitra Kerja Sama | Nomor Perjanjian Kerja Sama | Jangka Waktu Kerja Sama | Bentuk Kerja Sama |
|----|---|---|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Bantuan Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Kelas III Penduduk Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/13-RK/427.11/2022 dan Nomor : 51/KTR/VII-07/0322 | 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022 | Pembayaran bantuan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP Kelas III dengan status kepesertaan aktif yang terdaftar di FKTP Kabupaten Lumajang |
| 14 | Perjanjian Kerjasama tentang Kemitraan Dalam Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Lumajang Antara PPT-PPA Kab. Lumajang Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, RSUD dr. Haryoto, dan RSUD Pasirian | Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, RSUD dr. Haryoto, dan RSUD Pasirian | 445/033/427.42/2022 | 5 Tahun | Pelayanan Kesehatan(Medikolegal) |
| 15 | Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial | DISPENDUK CAPIL | 460/1106/427.64/2022 | Selama masih diperlukan | Kesiapan menggunakan jaringan tertutup atau VPN |
| 16 | Rencana Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Lumajang Dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang | BPJS Kesehatan Cabang Jember | Nomor : 130/35-RK/427.11/2022 | 1 Tahun | Melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk PBPU dan BP Pemda Kabupaten Lumajang |

| No | Judul Perjanjian Kerja Sama | Mitra Kerja Sama | Nomor Perjanjian Kerja Sama | Jangka Waktu Kerja Sama | Bentuk Kerja Sama |
|----|--|---|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Dengan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lumajang Tentang Penyaluran Bantuan BLT DBHCHT | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lumajang | Nomor : 460/3312/427.4 2/2022; Nomor: LMJ/5/184/202 2 | 1 Tahun | Melaksanakan Kerja sama layanan transaksi keuangan dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT |
| 18 | Kerjasama Pelaksanaan Program Inklusi - Institut KAPAL Perempuan "Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Untuk Memastikan Perspektif Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik Melalui Strategi Penguatan Kepemimpinan Perempuan" Di Kabupaten Lumajang | Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur | Nomor : 460/2775/427.4 2/2022; Nomor : 003/KPS2K/PKS /KPS2K-Pemkab Lumajang/X/20 22 | 5 Tahun | Pendampingan Sekolah Perempuan (SEKOPER) |

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diidentifikasi dari masalah pokok sampai dengan akar masalah. Gambaran permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Tabel 3.1 T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia | Kurangnya peran serta perempuan dalam pembangunan | 1. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender |
| | | | 2. Masih rendahnya peran perempuan dalam partai politik, pemerintahan dan lembaga perekonomian |
| | | | 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih dibawah capaian Provinsi Jawa Timur |
| | | | 4. Perangkat Daerah masih belum 100% membuat dokumen ARG |
| | | | 5. Kurang optimalnya data terpilah Gender dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 2 | Belum terciptanya ruang wilayah yang nyaman | Potensi kerawanan wilayah | 1. Belum optimalnya upaya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) |
| | | | 2. Belum optimalnya Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial |
| | | | 3. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| | | | 4. Belum ada Regulasi Daerah yang mendukung Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra PD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap RPD. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2) merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; 3) luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 3 tahun kedepan adalah:

- 1) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
 - b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.
 - d. Kurangnya pembangunan basis data pilah dan tersedianya database perempuan dan anak.
 - e. Stagnansi predikat Kabupaten Layak Anak yang diperoleh Kabupaten Lumajang.
 - f. Belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 2) Urusan Bidang Sosial
 - a. Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS dari tahun ke tahun.
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos.
 - c. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
 - d. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) belum sesuai standar.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :1) meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender; 2) terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman. Adapun indikator dari tujuan tersebut adalah : 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); 2) Indeks Pemberdayaan Gender. Penghitungan dari kedua indikator tersebut adalah menggunakan data penghitungan BPS.

Adapun sasaran yang akan dicapai Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 sebagai berikut : 1) meningkatnya pemberdayaan perempuan; 2) meningkatnya kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah : 1) Indeks Rasa Aman; 2) Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya. Penghitungan dari indikator pertama adalah menggunakan hasil penghitungan capaian indeks rasa aman sedangkan indikator yang kedua adalah jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi dengan jumlah seluruh PPKS dikali 100%. Secara rinci uraian di atas dijabarkan pada Tabel 4.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Target | | |
|--|--|---|----------|---|--------|-------|-------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | Penghitungan BPS | 89,09 | 89,30 | 89,51 |
| | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender | Angka | Penghitungan BPS | 59,75 | 59,87 | 59,98 |
| Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman | | Indeks Rasa Aman | Predikat | Hasil Penghitungan Capaian Indeks Rasa Aman | Aman | Aman | Aman |
| | Meningkatnya kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | % | Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi dengan Jumlah seluruh PPKS dikali 100% | 84,74 | 85,44 | 86,14 |

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). Penjabaran cascading kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 4.2 Cascading Kinerja.

Tabel 4.2 Cascading Kinerja

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
| | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | | Indeks Pemberdayaan Gender |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD |
| | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan PUG |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|---------------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi anggota parlemen |
| | | | Jumlah Perempuan anggota ormas yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga |
| | | | Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi pengambil keputusan |
| | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memenuhi SOP layanan |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) |
| | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kekerasan dilaporkan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan rujukan lanjutan |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memberikan layanan sesuai standart |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas |
| | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan KG dan Hak Anak |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak |
| | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak |
| | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya |
| | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kelembagaan sesuai standart |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase capaian 4 cluster pemenuhan hak anak |
| | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak |
| | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran |
| | | Perencanaan , Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|---|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman | | | Indeks Rasa Aman |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Meningkatnya kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani |
| | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase KSB dan Tagana yang memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
| | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya |
| | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah warga negara migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi Kab/Kota ke Desa/Kelurahan Asal |
| | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti |
| | | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyediaan Permakanaan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-kegiatan | Indikator |
|--------|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang terfasilitasi |
| | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota |
| | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi |
| | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan proses perumusan langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun waktu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada dan yang sedang berkembang sekaligus mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka terdapat strategi dan arah kebijakan yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 3 tahun. Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut terdapat pada Tabel 5.1 T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.

Tabel 5.1 T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Meningkatkan pengarusutamaan gender dengan cara meningkatkan pemberdayaan perempuan. Selain itu juga melalui ARG (Anggaran Responsive Gender) dalam rangka mengakomodir kesetaraan kebutuhan laki laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, kesetaraan dalam memenuhi kebutuhan khususnya serta alokasi anggaran untuk kepentingan umum yang bisa di nikmati bersama. | Meningkatkan pemberdayaan perempuan |
| Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman | Meningkatnya kesejahteraan PPKS | Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana antara lain dengan cara peningkatan desa/kelurahan tangguh bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial | Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana |
| | | Meningkatkan kondusifitas daerah melalui peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | Meningkatkan kapasitas penanganan bencana |

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Selaras dengan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, Program Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan dengan rincian 13 program, 29 kegiatan, dan 81 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut ditetapkan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu anggaran disajikan pada Tabel 6.1 T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 6.1 T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|---|---|--|------------------|--|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2082 | Meningkatnya fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD | % | Jumlah ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja APBD dikali 100% | 19,84% | 23 | 157.210.000 | 24 | 172.931.000 | 25 | 190.224.100 | 25 | 520.365.100 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 208201 | Meningkatnya fasilitasi pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan PUG | % | Jumlah PD yang melaksanakan minimal 5 prasyarat PUG dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100% | 18,37% | 24 | 77.591.000 | 31 | 85.350.100 | 37 | 93.885.110 | 37 | 256.826.210 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kec. Lumajang |
| 208201 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 46 dokumen | 49 | 57.788.000 | 49 | 63.566.800 | 49 | 69.923.480 | 147 | 191.278.280 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kec. Lumajang |
| 08201 | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 18 | 10.056.000 | 28 | 11.061.600 | 49 | 12.167.760 | 49 | 33.285.360 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahunan perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|-------|---|--|---|------------------|---|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08201 | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | N/A | 49 | 9.747.000 | 49 | 10.721.700 | 49 | 11.793.870 | 49 | 9.747.000 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |
| 08202 | Meningkatnya Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi anggota parlemen | orang | Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi anggota parlemen | 8 Orang | 9 | 29.200.000 | 9 | 32.120.000 | 9 | 35.332.000 | 9 | 96.652.000 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| | | | Jumlah Perempuan anggota ormas yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga | orang | Jumlah Perempuan anggota ormas yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga | N/A | 75 | | 75 | | 225 | | | | | |
| | | | Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi pengambil keputusan | orang | Jumlah Perempuan anggota ormas yang menjadi pengambil keputusan | 34 Orang | 35 | | 36 | | 37 | | 37 | | | |
| 08202 | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 2 | 21.400.000 | 2 | 23.540.000 | 2 | 25.894.000 | 6 | 70.834.000 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|-------|--|--|--|------------|---|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08202 | Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota | Organisasi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota | N/A | 30 | 7.800.000 | 30 | 8.580.000 | 30 | 9.438.000 | 30 | 25.818.000 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kec. Lumajang |
| 08203 | Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memenuhi SOP layanan | % | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memenuhi SOP layanan | 7,89% | 10,53 | 50.419.000 | 15,79 | 55.460.900 | 21,05 | 61.006.990 | 21,05 | 166.886.890 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 0203 | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | Lembaga | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | N/A | 25 | 10.900.000 | 25 | 11.990.000 | 26 | 13.189.000 | 76 | 36.079.000 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|---------|---|---|--|--------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0820302 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | orang | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | N/A | 152 | 39.519.000 | 154 | 43.470.900 | 156 | 47.817.990 | 156 | 130.807.890 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |
| 083 | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | per 100.000 | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000 | 4,00 per 100.000 | 5,72 | 78.965.000 | 5,15 | 86.861.500 | 4,57 | 95.547.650 | 4,57 | 261.374.150 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 08301 | Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus kekerasan terlaporkan | Kasus | Jumlah kasus kekerasan terlaporkan | 14 Kasus | 20 | 20.200.000 | 18 | 22.220.000 | 16 | 24.442.000 | 54 | 66.862.000 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 08301 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 1 | 10.100.000 | 1 | 11.110.000 | 1 | 12.221.000 | 3 | 33.431.000 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 08301 | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 30 | 10.100.000 | 30 | 11.110.000 | 30 | 12.221.000 | 30 | 33.431.000 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|-------|--|---|--|----------|---|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08302 | Terlayannya perempuan korban kekerasan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan rujukan lanjutan | % | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan rujukan lanjutan dibagi Jumlah seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dikali 100% | 78,57% | 75 | 23.640.000 | 94,44 | 26.004.000 | 100 | 28.604.400 | 100 | 78.248.400 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 08302 | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Orang | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 14 Orang | 20 | 13.000.000 | 18 | 14.300.000 | 16 | 15.730.000 | 54 | 43.030.000 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 08302 | Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | layan an | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 Layana n | 15 | 10.640.000 | 17 | 11.704.000 | 16 | 12.874.400 | 48 | 35.218.400 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 08303 | Terselenggaranya layanan perlindungan perempuan sesuai standart oleh lembaga penyedia layanan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memberikan layanan sesuai standart | Lembaga | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memberikan layanan sesuai standart | 5 lembaga | 13 | 35.125.000 | 15 | 38.637.500 | 43 | 42.501.250 | 71 | 116.263.750 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|-------|--|---|--|----------|--|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08303 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | orang | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | N/A | 50 | 15.800.000 | 50 | 17.380.000 | 52 | 19.118.000 | 152 | 52.298.000 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 08303 | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 1 | 19.325.000 | 1 | 21.257.500 | 1 | 23.383.250 | 3 | 63.965.750 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 084 | Meningkatnya kualitas keluarga | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah seluruh Keluarga dikali 100% | 0% | 0,008 | 84.225.000 | 0,008 | 92.647.500 | 0,008 | 101.912.250 | 0,024 | 278.784.750 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 08401 | Meningkatnya kapasitas keluarga terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak | Keluarga | Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak | N/A | 37 | 48.805.000 | 30 | 53.685.500 | 30 | 59.054.050 | 90 | 161.544.550 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|-------|---|--|--|------------------|--|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------|-------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08401 | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 20 | 24.360.000 | 20 | 26.796.000 | 20 | 29.475.600 | 20 | 80.631.600 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 08401 | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 1 | 24.445.000 | 1 | 26.889.500 | 1 | 29.578.450 | 3 | 80.912.950 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 08402 | Meningkatnya jumlah keluarga yang mendapatkan layanan KG dan Hak Anak | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan KG dan Hak Anak | keluarga | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan KG dan Hak Anak | N/A | 30 | 35.420.000 | 31 | 38.962.000 | 31 | 42.858.200 | 92 | 117.240.200 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|---|---|---|---------|---|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 080202 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 60 | 35.420.000 | 62 | 38.962.000 | 62 | 42.858.200 | 184 | 117.240.200 | Sub Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga | Kab. Lumajang |
| 0805 | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak | % | Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dibagi seluruh perangkat daerah dikali 100% | 34,69% | 40,82 | 33.039.000 | 46,94 | 36.342.900 | 53,06 | 39.977.190 | 53,06 | 109.359.090 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 080501 | Meningkatnya pengelolaan data gender dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak | % | Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak dibagi seluruh perangkat daerah dikali 100% | 51,02% | 61,22 | 33.039.000 | 71,43 | 36.342.900 | 81,63 | 39.977.190 | 81,63 | 109.359.090 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender | Kab. Lumajang |
| 080501 | Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | Dokumen | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 1 | 13.194.000 | 1 | 14.513.400 | 1 | 15.964.740 | 3 | 43.672.140 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kec. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|---------|--|---|---|---------|---|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0850102 | Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 1 | 19.845.000 | 1 | 21.829.500 | 1 | 24.012.450 | 3 | 65.686.950 | Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Kab. Lumajang |
| 086 | Terpenuhi hak anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya | % | Jumlah anak yang terpenuhi haknya dibagi jumlah seluruh anak dikali 100% | 77,54 | 77,72 | 36.872.300 | 77,80 | 40.559.530 | 77,89 | 44.615.483 | 77,89 | 122.047.313 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | |
| 08601 | Tercapainya pemenuhan pelebagaan PHA sesuai standart pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan kelembagaan sesuai standart | % | Jumlah nilai indikator kelembagaan yang dicapai sesuai standart KLA dibagi seluruh nilai pada indikator kelembagaan KLA dikali 100% | 83,67% | 85,00 | 31.552.300 | 85,67 | 34.707.530 | 86,33 | 38.178.283 | 86,33 | 104.438.113 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | |
| 08601 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 3 | 31.552.300 | 3 | 34.707.530 | 3 | 38.178.283 | 9 | 104.438.113 | Sub Substansi Pengarusutamaan Hak Anak | Kab. Lumajang |
| 08602 | Tercapainya pemenuhan hak anak pada 4 cluster | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase capaian 4 cluster pemenuhan hak anak | % | Jumlah capaian 4 cluster pemenuhan hak anak dibagi total cluster pemenuhan hak anak dikali 100% | 53,76% | 55,96 | 5.320.000 | 57,06 | 5.852.000 | 58,17 | 6.437.200 | 58,17 | 17.609.200 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|---|---|--|---------|--|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|--|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 080204 | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 4 | 5.320.000 | 4 | 5.852.000 | 4 | 6.437.200 | 12 | 17.609.200 | Sub Substansi Pengarusutamaan Hak Anak | Kab. Lumajang |
| 0807 | Terpenuhinya perlindungan khusus anak | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak | % | nilai capaian cluster perlindungan khusus anak dibagi nilai maksimal dikali 100% | 59,17 | 61,46 | 54.488.000 | 63,41 | 59.936.800 | 64,88 | 65.930.480 | 64,88 | 180.355.280 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | % |
| 080702 | Terlayannya anak yang memerlukan perlindungan khusus | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | % | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) | 0,0164 | 0,018 | 43.238.000 | 0,016 | 47.561.800 | 0,015 | 52.317.980 | 0,049 | 143.117.780 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | layan an |
| 080702 | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | orang | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 46 | 50 | 5.000.000 | 46 | 5.500.000 | 43 | 6.050.000 | 139 | 16.550.000 | Sub Substansi Perlindungan Anak, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia | Oran g |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi | | | | |
|----------|---|---|--|----------|--|--|--|------------|--|-------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 08702 | Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | layan an | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 | 50 | 38.238.000 | 46 | 42.061.800 | 43 | 46.267.980 | 139 | 126.567.780 | Sub Substansi Perlindungan Anak, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia | Layanan | | | | |
| 08703 | Meningkatnya peran lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak | % | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak dibagi jumlah seluruh lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dikali 100% | N/A | 100 | 11.250.000 | 100 | 12.375.000 | 100 | 13.612.500 | 100 | 37.237.500 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | % | | | | |
| 08703 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Doku men | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 1 | 11.250.000 | 1 | 12.375.000 | 1 | 13.612.500 | 3 | 37.237.500 | Sub Substansi Perlindungan Anak, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia | doku men | | | | |
| X | X | 0 | X | 1 | Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | % | Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 4.541.659.131,50 | 100 | 4.995.825.044,65 | 100 | 5.495.407.549,12 | 100 | 15.032.891.725,27 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA |

| Kode | | | | | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|------|---|---|---|---|--|---|--|---------|---|---|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | % | Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 18.510.000,00 | 100 | 20.361.000,00 | 100 | 22.397.100,00 | 100 | 61.268.100,00 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 3.000.000,00 | 3 | 3.300.000 | 2 | 3.630.000 | 7 | 9.930.000,00 | Sub Subtansi Penyusunan Program dan Kegiatan | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 6.786.000,00 | 1 | 7.464.600 | 1 | 8.211.060 | 3 | 22.461.660,00 | Sub Subtansi Penyusunan Program dan Kegiatan | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | 2 | 793.000,00 | 2 | 872.300 | 2 | 959.530 | 6 | 2.624.830,00 | Sub Subtansi Penyusunan Program dan Kegiatan | Dinas Sosial, PPPA |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------|---|---|--|-------------|--|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 1 | 0 6 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 5 | 2.142.000,00 | 2.356.200 | 5 | 2.591.820 | 15 | 7.090.020,00 | Sub Subtansi Penyusunan Program dan Kegiatan | Dinas Sosial, PPPA | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 1 | 0 7 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 | 16 | 5.789.000,00 | 6.367.900 | 16 | 7.004.690 | 48 | 19.161.590,00 | Sub Subtansi Penyusunan Program dan Kegiatan | Dinas Sosial, PPPA | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | | Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 3.380.640.122,00 | 3.718.704.134,20 | 100 | 4.090.574.547,62 | 100 | 11.189.918.803,82 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 | 28/12 | 3.320.845.122,00 | 28/12 | 3.652.929.634 | 28/12 | 4.018.222.598 | 28/36 | 10.991.997.353,82 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 2 | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | 12 | 50.757.000,00 | 12 | 55.832.700 | 12 | 61.415.970 | 36 | 168.005.670,00 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------|---|---|--|---------|--|----|--------|--------------|---------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 3 | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 12 | 1.460.000,00 | 12 | 1.606.000 | 12 | 36 | 3.372.600,00 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 4 | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 12 | 1.460.000,00 | 12 | 1.606.000 | 12 | 36 | 3.372.600,00 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 5 | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 1.066.000,00 | 1 | 1.172.600 | 1 | 3 | 2.462.460,00 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 7 | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 18 | 3.592.000,00 | 18 | 18 | 18 | 20 | 54 | 8.297.520,00 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 2 | 0 8 | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | 1 | 1.460.000,00 | 1 | 1.606.000 | 1 | 3 | 3.372.600,00 | Sub Subtansi Keuangan | Dinas Sosial, PPPA | |

| Kode | | | | | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|------|---|---|---|---|---|---|--|---------|--|---|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | X | 0 | 2 | | Terpenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | % | Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 1.249.000,00 | 100 | 1.373.900,00 | 100 | 1.511.290,00 | | 4.134.190,00 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 | 2 | 562.000,00 | 2 | 618.200 | 2 | 680.020 | 6 | 1.860.220,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 | 2 | 687.000,00 | 2 | 755.700 | 2 | 831.270 | 6 | 2.273.970,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | | Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD | % | Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 2.304.000,00 | 100 | 2.534.400,00 | 100 | 23.787.840,00 | | 28.626.240,00 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | N/A | 0 | - | 0 | - | 1 | 21.000.000,00 | 1 | 21.000.000,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 | 12 | 2.304.000,00 | 12 | 2.534.400 | 12 | 2.787.840 | 36 | 7.626.240,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|--|---|--|---------|--|-------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| X | X | 0 | 2 | | Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah | % | Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dikali 100 | 100% | 100 | 309.290.658,00 | 100 | 340.219.723,80 | 100 | 374.241.696,18 | 1.023.752.077,98 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 18.819.606,00 | 1 | 20.701.567 | 1 | 22.771.723 | 3 | 62.292.895,86 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 3 | 146.709.502,00 | 3 | 161.380.452 | 3 | 177.518.497 | 9 | 485.608.451,62 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 | 2 | 20.606.550,00 | 2 | 22.667.205 | 2 | 24.933.926 | 6 | 68.207.680,50 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | 123.155.000,00 | 12 | 135.470.500 | 12 | 149.017.550 | 36 | 407.643.050,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | | Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan Barang Milik Daerah | % | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 23.325.151,50 | 100 | 25.657.666,65 | 100 | 28.223.433,32 | 77.206.251,47 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 | 5 | 15.000.151,50 | 4 | 16.500.167 | 1 | 18.150.183 | 10 | 33.150.334,82 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 1 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 3 | 8.325.000,00 | 1 | 9.157.500 | 0 | - | 4 | 17.482.500,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|---|--|---|--|--|--|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 | 0 8 | Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100 | 100% | 100 | 429.428.000,00 | 100 | 472.370.800,00 | 100 | 519.607.880,00 | 1.421.406.680,00 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | X | 0 1 | 2 0 | 0 1 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 824.000,00 | 12 | 906.400 | 36 | 2.727.440,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | X | 0 1 | 2 0 | 0 2 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 172.392.000,00 | 12 | 189.631.200 | 36 | 570.617.520,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | X | 0 1 | 2 0 | 0 4 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 256.212.000,00 | 12 | 281.833.200 | 36 | 310.016.520 | 848.061.720,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X X | X X | 0 1 | 2 0 | 0 9 | Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100 | 100% | 100 | 376.912.200,00 | 100 | 414.603.420,00 | 100 | 435.063.762,00 | 1.226.579.382,00 | Sekretariat | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | X | 0 1 | 2 0 | 0 2 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 | 21 | 234.462.200,00 | 21 | 257.908.420 | 21 | 776.069.882,00 | 283.699.262 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|--|---|---|-------|---|--------|--------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 45 | 0 | - | - | - | 1 | 10.073.250 | 1 | 140.509.500,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA | |
| X | X | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 0 | - | - | 1 | 110.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | - | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA | |
| | | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 2 | 100.000.000,00 | - | - | - | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| X | X | 0 | 2 | 1 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 1 | 100.000.000,00 | - | - | - | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | Subag Umum dan Kepegawaian | Dinas Sosial, PPPA |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | % | Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100% | 95 | 100 | 364.949.500,00 | 100 | 401.444.450,00 | 100 | 441.588.895,00 | 100 | 1.207.982.845,00 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kab. Lumajang | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tertanganinya korban Bencana Alam dan Sosial | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani | orang | Jumlah korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani | 11.137 | 1.137 | 45.587.000,00 | 1.148 | 50.145.700,00 | 1.160 | 55.160.270,00 | 3.445 | 150.892.970,00 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kab. Lumajang | |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|-------|---|---|--|---------|---|---|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|------------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10604 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 11.137 | 1.137 | 45.587.000,00 | 1148 | 50.145.700 | 1160 | 55.160.270 | 3.445 | 150.892.970,00 | Sub-Substansi PSKBS | Kab. Lumajang |
| 10602 | Terpenuhinya KSB dan Tagana yang memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase KSB dan Tagana yang memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana | % | Jumlah KSB dan Tagana yang memiliki kemampuan kesiapsiagaan bencana dibagi jumlah seluruh KSB dan Tagana dikali 100% | 100 | 100 | 319.362.500,00 | 100 | 351.298.750,00 | 100 | 386.428.625,00 | 100 | 1.057.089.875,00 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kab. Lumajang |
| 10602 | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kampung | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dibagi dengan Jumlah Kampung di lokasi Bencana | 3 | 5 | 54.362.500,00 | 5 | 59.798.750 | 5 | 65.778.625 | 5 | 151.530.625,00 | Sub-Substansi PSKBA | Kab. Lumajang |
| 10602 | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 31 | 37 | 265.000.000,00 | 42 | 291.500.000 | 47 | 320.650.000 | 47 | 877.150.000,00 | Sub-Substansi PSKBA | Kab. Lumajang |
| 10602 | Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah PSKS keseluruhan dikali 100% | 61,01 | 62,66 | 1.362.156.000,00 | 63,60 | 1.498.371.600,00 | 65,02 | 1.648.208.760,00 | 65,02 | 4.508.736.360,00 | Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|---|--|---|---------|---|---|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|------------------|--|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 106203 | Meningkatnya kemampuan PSKS | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya | % | Jumlah PSKS yang meningkat kompetensinya dibanding jumlah seluruh PSKS | 27,31 | 46,11 | 1.362.156.000,00 | 50,06 | 1.498.371.600,00 | 55,81 | 1.648.208.760,00 | 59,40 | 4.508.736.360,00 | Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan | Kab. Lumajang |
| 106203 | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 | 66 | 12.200.000,00 | 75 | 13.420.000 | 100 | 14.762.000 | 266 | 40.382.000,00 | Sub Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan | Kab. Lumajang |
| 106203 | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 | 15 | 301.238.000,00 | 18 | 331.361.800 | 21 | 364.497.980 | 21 | 997.097.780,00 | Sub Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan | Kab. Lumajang |
| 106203 | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 57 | 63 | 1.048.718.000,00 | 69 | 1.153.589.800 | 75 | 1.268.948.780 | 75 | 3.471.256.580,00 | Sub Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan | Kab. Lumajang |
| 1063 | Terfasilitasinya warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya | % | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dibagi Jumlah warga negara migran yang mengalami tindak kekerasan dibagi 100% | 100 | 100 | 36.000.000,00 | 100 | 39.600.000,00 | 100 | 43.560.000,00 | 100 | 119.160.000,00 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|--|--|--|----------|--|---|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 106301 | Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah warga negara migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi Kab/Kota ke Desa/Kelurahan Asal | Orang | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi kab/kota ke desa/kelurahan asal | 23 | 26 | 36.000.000,00 | 29 | 39.600.000,00 | 32 | 43.560.000,00 | 87 | 119.160.000,00 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Kab. Lumajang |
| 106301 | Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 22 | 24 | 36.000.000,00 | 26 | 39.600.000 | 28 | 43.560.000 | 78 | 119.160.000,00 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 1064 | Meningkatnya jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | % | Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PPKS keseluruhan dikali 100% | 93% | 93,39 | 4.562.451.950,00 | 93,41 | 5.018.697.145,00 | 93,42 | 5.520.566.859,50 | 93,42 | 15.101.715.954,50 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|---|---|---|--------|---|---|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|---|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 106401 | Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 | 35 | 10.170.000 | 40 | 11.187.000 | 45 | 12.305.700 | 120 | 33.662.700 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106401 | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 256 | 55 | 52.534.000,00 | 60 | 57.787.400 | 65 | 63.566.140 | 180 | 173.887.540 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106401 | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 | 18 | 3.240.000,00 | 27 | 3.564.000 | 36 | 3.920.400 | 81 | 10.724.400 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106402 | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar | % | jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dibagi Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dikali 100% | 100,00 % | 100,00 | 82.179.400,00 | 100,00 | 90.397.340,00 | 100,00 | 99.437.074,00 | 100,00 | 272.013.814,00 | Bidang Perlindungan Anak dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|--------|--|---|---|--------|---|---|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|---------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 106402 | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 106 | 105 | 51.106.000,00 | 110 | 56.216.600 | 114 | 61.838.260 | 329 | 169.160.860,00 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan , Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106402 | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 106 | 30 | 2.700.000,00 | 35 | 2.970.000 | 40 | 3.267.000 | 105 | 8.937.000,00 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan , Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106402 | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 40 | 6.216.000,00 | 45 | 6.837.600 | 50 | 7.521.360 | 135 | 20.574.960,00 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan , Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106402 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | 40 | 1.487.400,00 | 45 | 1.636.140 | 50 | 1.799.754 | 135 | 4.923.294,00 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan , Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 106402 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 106 | 40 | 7.960.000 | 45 | 8.756.000 | 50 | 9.631.600 | 135 | 26.347.600,00 | Sub Koordinator Sub-Substansi Pelayanan , Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahunan perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|---------|---|---|---|---------|--|---|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1064021 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 | 40 | 3.530.000 | 42 | 3.883.000 | 44 | 4.271.300 | 126 | 11.684.300,00 | Sub Koordinator Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 1064022 | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 94 | 25 | 6.480.000,00 | 27 | 7.128.000 | 29 | 7.840.800 | 81 | 21.448.800,00 | Sub Koordinator Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 1064024 | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 6 | 7 | 2.700.000 | 7 | 2.970.000 | 7 | 3.267.000 | 7 | 8.937.000,00 | Sub Koordinator Substansi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Disabilitas | Kab. Lumajang |
| 1065 | Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | % | Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibagi dengan Jumlah seluruh fakir miskin dan anak terlantar dikali 100% | 76,22 | 76,22 | 15.667.389.950,00 | 78 | 17.234.128.945,00 | 80 | 18.957.541.839,50 | 80 | 51.859.060.734,50 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kab. Lumajang |
| 10652 | Terfasilitasinya Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang terfasilitasi | % | Jumlah fakir miskin yang terfasilitasi dibagi Jumlah Fakir Miskin Keseluruhan dikali 100% | 32 | 34 | 15.667.389.950,00 | 35 | 17.234.128.945,00 | 36 | 18.957.541.840 | 36 | 51.859.060.734,50 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dan Bidang Dayassos | Kab. Lumajang |

| Kode | | | | | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---------|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|---|---------------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | 16 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | Orang | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 430.852 | 435.161 | 118.713.000,00 | 439.512 | 130.584.300 | 443.907 | 143.642.730,00 | 443.907 | 392.940.030,00 | Sub-Substansi Penyelenggaraan dan Jaminan Sosial dan Sub-Substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Kab. Lumajang |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 120.564 | 121.770 | 81.401.750,00 | 122.987 | 89.541.925 | 124.217 | 98.496.117,50 | 124.217 | 269.439.792,50 | Sub-Substansi Penyelenggaraan dan Jaminan Sosial dan Sub-Substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Kab. Lumajang |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terpenuhiya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 18.995 | 19.185 | 15.460.525.200,00 | 19.377 | 17.006.577.720 | 19.571 | 18.707.235.492,00 | 58.132 | 51.174.338.412,00 | Sub-Substansi Penyelenggaraan dan Jaminan Sosial dan Sub-Substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Kab. Lumajang |

| Kode | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|---------|---|--|--|----------|--|---|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1065020 | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (| 466 | 471 | 6.750.000,00 | 475 | 7.425.000 | 480 | 8.167.500 | 1.426 | 22.342.500,00 | Sub-Substansi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Sub-Substansi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin | Kab. Lumajang |
| 1067 | Meningkatnya kelestarian Taman Makam Pahlawan | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart | % | Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi dibagi seluruh kriteria standart pengelolaan dikali 100% | 62,86 | 65,71 | 138.067.000,00 | 68,57 | 151.873.700,00 | 71,43 | 167.061.070,00 | 71,43 | 457.001.770,00 | Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan | TMP |
| 10671 | Terpeliharanya Taman Makam pahlawan yang sesuai standart | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi | Kriteria | Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi | 22 | 23 | 138.067.000,00 | 24 | 151.873.700,00 | 25 | 167.061.070,00 | 25 | 457.001.770,00 | Bidang Penanganan, Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan | TMP |
| 10671 | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 30.613.000,00 | 1 | 33.674.300 | 1 | 37.041.730 | 3 | 101.329.030,00 | Sub Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan | TMP |

| Kode | | | | | Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Program/Kegiatan | Indikator | Satuan | Formulasi Penghitungan | Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022) | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Makam | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 424 | 428 | 107.454.000,00 | 432 | 118.199.400 | 436 | 130.019.340 | 436 | 355.672.740,00 | Sub Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kepahlawanan | TMP |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 memuat langkah strategis tugas penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial dan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan kabupaten. Berikut indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 yang tersaji pada Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Awal Kinerja | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Akhir |
|----|---|----------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | Tahun 2026 |
| | Tujuan | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 88,77 | 89,09 | 89,30 | 89,51 | 89,51 |
| 2 | Indeks Risiko Aman | Predikat | N/A | Aman | Aman | Aman | Aman |
| | Sasaran | | | | | | |
| 1 | Indeks Pemberdayaan Gender | Angka | 59,61 | 59,75 | 59,87 | 59,98 | 59,98 |
| 2 | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | % | 84,56 | 84,74 | 85,44 | 86,14 | 86,14 |

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi menjadi 2 tujuan, dan 2 sasaran. Untuk sasaran pertama yaitu Indeks Pemberdayaan Gender di dukung oleh pelaksanaan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari 6 program dan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan sasaran kedua yaitu Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya didukung oleh Urusan Bidang Sosial dengan 6 program. Adapun indikator dan target tujuan, sasaran, dan program dapat dilihat pada Tabel 7.2 T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Tabel 7.2 T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|---|--|----------|---|--|-----------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Tujuan | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | Penghitungan BPS | 88,77 | 89,09 | 89,30 | 89,51 | 89,51 |
| 2 | Terciptanya kesiapsiagaan bencana dan rasa aman | Indeks Rasa Aman | Predikat | Hasil Penghitungan Capaian Indeks Rasa Aman | N/A | Aman | Aman | Aman | Aman |
| | Sasaran | | | | | | | | |
| 1.1 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender | Angka | Penghitungan BPS | 59,61 | 59,75 | 59,87 | 59,98 | 59,98 |
| | Program | | | | | | | | |
| | Meningkatnya fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD | % | Jumlah ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja APBD dikali 100% - pada belanja rutin sekretariat tidak di ARG kan dan penyebut dikurangi belanja rutin sekretariat (netral gender) | 19,84% | 23% | 24% | 25% | 25% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|---|--|--------|---|--|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya kualitas keluarga | Persentase keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | Jumlah keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah seluruh Keluarga dikali 100% catatan: Jumlah seluruh Keluarga didapat dari dispenduk capil | 0% | 0,008% | 0,008% | 0,008% | 0,024% |
| | Meningkatnya kemanfaatan data gender dan anak | Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak | % | Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dibagi seluruh perangkat daerah dikali 100% catatan:- Pemanfaatan data terpilah masuk dalam dokumen PPRG dan renja- dihitung 1 PD yang memanfaatkan apabila terdapat data terpilih pada kedua dokumen yaitu PPRG dan renja | 34,69% | 40,82% | 46,94% | 53,06% | 53,06% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|---------------------------------------|---|--------|---|--|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Terpenuhinya hak anak | Persentase Anak yang terpenuhi Haknya | % | Jumlah anak yang terpenuhi haknya dibagi jumlah seluruh anak dikali 100% catatan: - anak sudah terpenuhi haknya apabila sudah mendapatkan hak-hak mulai cluster 1 sampai 4 - nilai capaian cluster pemenuhan hak anak berdasarkan evaluasi kementerian tahun sebelumnya - jumlah anak terpenuhi haknya, sumber data berasal dari data rapor pendidikan (Dindik), kemenag dan LKSA - jumlah seluruh anak didapat dari Dispenduk | 77,54% | 77,72% | 77,80% | 77,89% | 77,89% |
| | Terpenuhinya perlindungan khusus anak | Persentase pemenuhan cluster perlindungan khusus anak | % | nilai capaian cluster perlindungan khusus anak dibagi nilai maksimal dikali 100% catatan: - nilai capaian cluster perlindungan khusus anak berdasarkan evaluasi kementerian tahun sebelumnya | 59,17% | 61,46% | 63,41% | 64,88% | 64,88% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|--|--|-------------|---|--|-----------------------------|------|------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | per 100.000 | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000 catatan: pembilang adalah Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan termasuk TPPO penyebut adalah jumlah penduduk perempuan (usia 19-64 tahun) bersumber dari Dispenduk capil | 4,00 per 100.000 | 5,72 | 5,15 | 4,57 | 4,57 |
| | Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | % | Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang ditangani dibagi seluruh fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Sasaran | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|--|---|--------|---|--|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Meningkatnya kesejahteraan PPKS | Persentase PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya | % | Jumlah PPKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya dibagi dengan Jumlah seluruh PPKS dikali 100% | 84,56 | 84,74 | 85,44 | 86,14 | 86,14 |
| | Program | | | | | | | | |
| | Terfasilitasnya warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya | % | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani dibagi Jumlah warga negara migran yang mengalami tindak kekerasan dibagi 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | % | Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PPKS keseluruhan dikali 100% catatan: - PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar adalah yang ditangani Dinsos P3A 8 unsur | 93% | 93,39% | 93,41% | 93,42% | 93,42% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|---|--|--------|--|--|-----------------------------|------|------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | - PPKS keseluruhan adalah 8 unsur PPKS | | | | | |
| | Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar | Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | % | Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dibagi dengan Jumlah seluruh fakir miskin dan anak terlantar dikali 100% | 76,22% | 76,22% | 78% | 80% | 80% |
| | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten | % | Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi Penghitungan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|--|--|--------|--|--|-----------------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Meningkatnya peran aktif PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah PSKS keseluruhan dikali 100% catatan:Kriteria PSKS yang berperan aktif dibuktikan dengan laporan kegiatan serta hasil monev dari dinsos:- PSM- TKSK - LKS - Karang taruna - Karang wreda - Pekerja Sosial - Penyuluh Sosial- LK3 - Perusahaan yang tergabung dalam forum CSR | 61,01% | 62,66% | 63,60% | 65,02% | 65,02% |
| | Meningkatnya kelestarian Taman Makam Pahlawan | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai standart | % | Jumlah Kriteria standart pengelolaan TMP yang sudah dipenuhi dibagi seluruh kriteria standart pengelolaan dikali 100% catatan: sesuai dengan Permensos Nomor 23 Tahun 2014 | 62,86% | 65,71% | 68,57% | 71,43% | 71,43% |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam periode tahun 2024-2026 yang disusun mengacu pada RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang. tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang untuk tahun yang sama.


Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta laporan kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini dapat berjalan efektif. Renstra PD ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta

upaya- upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Semoga Resntra PD Dinas osial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dan masyarakat Lumajang pada umumnya.

Lumajang, 2 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002